

IMPLEMENTASI PENATAAN DAN PEMERATAAN ASN GURU SMP OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

Hapsari Dwyputri Anrissa

NPP. 29.0803

Asdaf Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik

Email: panrissa@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The central government has begun to involve city or district governments to manage or administer education in their regions during this era of regional autonomy. Efforts are being made in equalizing the quality of education, the government makes a policy regarding the distribution and arrangement of teachers. The number of teachers in Pemalang Regency is already quite large, but the distribution of teachers in Pemalang Regency is not evenly distributed. Therefore, researchers are interested in conducting research with the title *Implementation of Arrangement and Equity of ASN SMP Teachers by the Education and Culture Office of Pemalang Regency, Central Java Province*. **Purpose:** The purpose of this study is to find out and describe how the implementation of arrangement and distribution of ASN SMP teachers by the Education and Culture Office of Pemalang Regency, Central Java Province. **Method:** This research uses qualitative research with descriptive method and inductive approach. Sources of data used are primary and secondary data. Data collection techniques with interviews, observation and documentation. Data analysis techniques were obtained through data reduction, data presentation and conclusion drawing. **Result:** The results of the study indicate that the implementation of the arrangement and distribution of ASN for junior high school teachers by the Education and Culture Office of Pemalang Regency has been carried out quite well. **Conclusion:** The Education and culture office of pemalang perform the formation or rearrangement of resources properly, the procedures taken have also been carried out properly. However, there are several obstacles that hinder the implementation of this program. The advice given by the researcher is that related to the shortage of PNS teachers, the government can propose to increase the quota of PNS teachers when there is PNS recruitment and pay attention to the acceptance of the number of PNS or non-PNS teachers who are accepted with the number of teachers entering retirement using workload analysis in the field.

Keywords: Teeacheer, Implementation, Management, Education

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Pemerintah pusat sudah mulai melibatkan pemerintah kota atau kabupaten untuk mengelola mengurus pendidikan di daerahnya pada era otonomi daerah ini. Upaya yang dilakukan dalam pemerataan kualitas pendidikan, pemerintah membuat sebuah kebijakan mengenai pemerataan dan penataan guru. Jumlah guru di Kabupaten Pemalang sudah terbilang banyak, tetapi penyebaran guru di Kabupaten Pemalang belum merata. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Implementasi Penataan dan Pemerataan ASN Guru SMP Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. **Tujuan:** Tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi penataan dan pemerataan ASN Guru SMP oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif serta pendekatan induktif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data diperoleh melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi penataan dan pemerataan ASN guru SMP oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang sudah dilakukan cukup baik hal ini bisa terlihat dari beberapa subfaktor yang dapat terpenuhi salah satunya dalam faktor respek pada otoritas dan keputusan pemerintah. **Kesimpulan:** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang sudah melakukan pembentukan atau penataan ulang sumber daya dengan baik, prosedur yang ditempuh juga sudah dilakukan dengan tepat. Namun, ada beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat berjalannya program ini. Saran yang diberikan peneliti yakni berhubungan dengan kekurangan guru PNS, pemerintah dapat mengajukan penambahan kuota guru PNS ketika adanya rekrutmen PNS dan memerhatikan penerimaan jumlah guru baik PNS atau non PNS yang diterima dengan jumlah guru yang memasuki masa pensiun dengan menggunakan analisis beban kerja di lapangan.

Kata Kunci : Guru, Implementasi, Manajemen, Pendidikan



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu pilar pembangunan bangsa disamping pembangunan sumber daya alam dan teknologi. Dalam hal pembangunan sumber daya manusia, pendidikan merupakan salah satu sektor strategis yang perlu menjadi fokus perhatian. Hal ini mengingat pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Dengan demikian kualitas sumber daya manusia tergantung dari kualitas pendidikannya

Penelitian *Indonesia Cooperation Watch* (ICW) menyebutkan jika pemerintah telah gagal mencapai sasarannya. Menata dan pemerataan guru memang sudah dijalankan daerah, namun semua itu terdorong dengan adanya kewajiban guru yang harus memenuhi 24 jam mengajar perminggu dalam program sertifikasi guru. ICW menilai masalah penempatan guru dalam kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) lebih menitik beratkan pada sektor penawaran kepada guru dari pada permintaan guru. Mutasi guru juga dinilai menjadi masalah sehingga banyaknya guru yang masih belum bersedia untuk ditempatkan ke sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil karena fasilitas yang ada di daerah masih minim untuk menunjang berjalannya proses belajar mengajar.

Berdasarkan permasalahan di atas, Pemerintah pusat kemudian mengambil langkah strategis melalui Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai usaha untuk mengatasi permasalahan dalam hal pemerataan dan penataan guru.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Fakta yang saat ini terjadi di wilayah Kabupaten Pemalang adalah masih adanya kendala dalam penyebaran guru yang belum merata. Masih ada beberapa daerah yang timpang baik jumlah guru maupun kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dengan kecamatan-kecamatan pelosok. Kabupaten Pemalang sendiri berada di posisi ke-5 setelah Kabupaten Brebes dengan jumlah guru sebanyak 52.119 orang.

Di Kecamatan Pemalang sendiri rasio guru terhadap siswa hanya 1:21, yang artinya 1 guru bertanggung jawab terhadap 21 siswa. Sedangkan untuk kecamatan pelosok seperti Kecamatan Watukumpul dan Kecamatan Warungpring, rasio guru terhadap siswa bisa mencapai 1:40 bahkan 1:45, yang artinya 1 guru bertanggung jawab terhadap 40 sampai dengan 45 siswa. Padahal berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru pasal 17 ayat 2 dikatakan bahwa rasio minimal jumlah guru terhadap murid pada tingkat SMP adalah 1:20.

Hal ini juga sangat mencerminkan belum tercapainya Visi Kabupaten Pemalang yang Aman, Agamis, Adil dan Makmur dan Visi Jokowi tahun 2019-2024 yaitu “SDM Unggul Indonesia Maju”. Bagaimana mungkin SDM bisa unggul apabila pendidikan yang didapat saat ini belum maksimal karena masih terkendalanya masalah pada penataan dan pemerataan tenaga pendidikannya.

Peneliti berfokus pada bagaimana implementasi penataan dan pemerataan ASN guru SMP ini berjalan, terutama dalam memaksimalkan manajemen ASN guru SMP yang ada agar pemerataan dan penataannya sesuai dengan kebutuhan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian terdahulu terkait implementasi penataan dan pemerataan guru. Dheni Setyawan (2015) dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerataan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Jombang. Metode penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerataan Mutu Pendidikan SMA di Kabupaten Jombang belum berjalan dengan efektif, dalam Implementasi Kebijakan Pemerataan Mutu Pendidikan SMA di Kabupaten Jombang terdapat beberapa faktor yang memiliki pengaruh signifikan baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) organisasi penyelenggara pendidikan Penelitian. Citra Dewi (2018), Implementasi Kebijakan Pemerataan Guru (Studi Kasus pada SMK di Kabupaten Bengkulu Utara). Metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini maka perlu direkomendasikan beberapa hal, diantaranya; diperlukan Undang Undang tentang profesi guru sebagai pedoman guru dalam melakukan tugasnya secara profesional, perlu diadakan pelatihan terhadap guru dalam meningkatkan profesionalitas yang sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensi yang akan diberikan. Penelitian Hery Azhar (2018), Analisis Implementasi Kebijakan Pemerataan Pendidikan Melalui Program Guru Garis Depan (GGD) di Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program GGD di Kabupaten Bandung Barat telah berhasil dilaksanakan. Namun bila melihat dari pemenuhan empat unsur utama implementasi yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan/program maka masih dapat dikatakan belum maksimal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi penataan dan pemerataan ASN Guru SMP oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, dengan menggunakan dimensi dan indikator yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu menggunakan teori implementasi Leo Agustino (2020).

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana implementasi, faktor, dan upaya apa yang dihadapi dalam penataan dan pemerataan ASN Guru SMP oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan pendekatan induktif. Selain itu penulis menggunakan pengumpulan data informasi menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Data yang terkumpul penulis analisis dengan mereduksi data kemudian menyajikan data dan yang terakhir menarik kesimpulan. Adapun analisisnya menggunakan teori Leo Agustino dengan indikatornya yaitu respek pada otoritas dan keputusan pemerintah, kesadaran menerima kebijakan, dan kepentingan pribadi atau kelompok.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi penataan dan pemerataan ASN Guru SMP oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang

Respek pada Otoritas dan Keputusan Pemerintah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang sudah melakukan berbagai upaya untuk

menyukseskan program tersebut salah satunya yaitu pembentukan Kordinator Wilayah Kecamatan untuk mengetahui keadaan real di lapangan guna mengurangi pelanggaran atau perlawanan maupun insubordinasi dari pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah ASN guru SMP. Dengan adanya pembagian unit sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sudah membantu berjalannya pelaksanaan program penataan ini.

Kesadaran Menerima Kebijakan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang melaksanakan dengan cara mengeluarkan surat keputusan agar para pihak yang terlibat lebih memahami dan mematuhi kebijakan yang menjadi dasar program ini serta program ini mempunyai pijakan yang kuat dalam melaksanakan apa yang telah direncanakan.

Kepentingan Pribadi atau Kelompok

Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah memberikan perhatian dan pengawasan yang optimal agar program ini bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya antara lain dengan cara melakukan rapat langsung, melakukan koordinasi dengan komisi 4 DPRD yang membawahi tentang pendidikan langsung datang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang untuk mengontrol segala urusan yang bersangkutan. Hal ini menggambarkan bahwa aspek aplikasi dalam implementasi program penataan dan pemerataan ASN guru SMP dilihat dari unsur monitoring adalah baik

3.2 Kendala Dalam Implementasi Penataan dan Pemerataan ASN Guru SMP oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belum terimplementasinya program penataan dan pemerataan ASN guru SMP sesuai dengan kenyataan di lapangan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

Kurangnya Jumlah Guru PNS

Kabupaten Pemalang mengalami kekurangan jumlah PNS guru pada saat ini. Semua ini diakibatkan banyaknya PNS guru yang sudah memasuki masa pensiun dan belum adanya rekrutmen pendaftaran PNS guru.

Ketidaksiapan Guru Apabila Ditempatkan di Kecamatan Pedalaman

Selain kekurangan jumlah guru PNS yang menjadi kendala selanjutnya ialah guru yang ada baik PNS ataupun non-PNS belum siap apabila ditempatkan di kecamatan pedalaman dengan beralasan masih kurangnya sarana prasarana yang nanti diperoleh di daerah kecamatan pedalaman.

Proses Perencanaan, Penyusunan, dan Pengadaan Guru yang Masih Menggunakan Sstem Penawaran Bukan Permintaan

Kondisi dilapangan di Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan program penataan dan pemerataan ASN guru SMP ini masih belum akurat. Yang dimana proses ini masih menggunakan system penawaran bukan permintaan serta masih menggunakan azas suka tidak suka.

3.3 Upaya Dalam Implementasi Penataan dan Pemerataan ASN Guru SMP oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang

Untuk memaksimalkan pelaksanaan program penataan dan pemerataan ASN guru SMP ini perlu beberapa upaya dalam mengatasi berbagai hambatan yang ada sehingga dapat mengimplementasi program penataan dan pemerataan ASN guru SMP ini dapat berjalan sesuai dengan yang

diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap beberapa orang informan, maka upaya-upaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Melakukan Rekrutmen Guru PNS

Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang mengajukan untuk menambahkan kuota guru PNS dalam pengangkatan PNS dalam periode selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Pemalang berupaya agar bisa menambah jumlah kuota pengangkatan guru PNS dikarenakan jumlah guru PNS di Kabupaten Pemalang sangatlah minim sedangkan guru PNS sangat dibutuhkan di beberapa daerah karena tidak adanya guru PNS di daerah tersebut.

Menyediakan Sarana dan Prasarana yang Maksimal di Kecamatan Pedalaman

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang harus bisa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam menyediakan, memperbaiki, ataupun melengkapi fasilitas sarana prasarana yang dibutuhkan di kecamatan pedalaman.

Memperbaiki Proses Perencanaan, Penyusunan, Dan Pengadaan Guru dengan Menggunakan Sistem dan Aplikasi yang Sudah Disediakan Pemerintah Pusat

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang melakukan tindakan untuk menggunakan kembali aplikasi yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat yaitu aplikasi tentang penataan dan pemerataan ASN guru. Aplikasi tersebut sudah dibuat sedemikian rupa oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempermudah dan mensukseskan program penataan dan pemerataan ASN guru.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi program penataan dan pemerataan ASN guru SMP oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang sudah dilakukan dengan baik. Hal ini bisa terlihat dari beberapa subfaktor yang dapat terpenuhi diantaranya dalam faktor respek pada otoritas dan keputusan pemerintah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang sudah melakukan penataan sumber daya dengan baik, komunikasi dan koordinasi juga sudah dilakukan dengan tepat. Berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya dimana bagaimana menyikapi timbulnya kecemburuan sosial bagi guru-guru honorer di sekolah-sekolah sasaran yang juga menuntut untuk di angkat menjadi PNS.

IV. KESIMPULAN

Implementasi program penataan dan pemerataan ASN guru SMP oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang sudah dilakukan dengan baik. Hal ini bisa terlihat dari beberapa subfaktor yang dapat terpenuhi diantaranya dalam faktor respek pada otoritas dan keputusan pemerintah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang sudah melakukan penataan sumber daya dengan baik, komunikasi dan koordinasi juga sudah dilakukan dengan tepat. Dalam menjalankan program ini juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang menggunakan beberapa regulasi dalam menjalankan implementasi penataan dan pemerataan ASN guru SMP ini walaupun masih ada beberapa langkah yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal kesadaran menerima kebijakan serta kepentingan pribadi atau kelompok sudah dianggap baik berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan. Walaupun implementasi program ini sudah baik namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang harus lebih

meningkatkan dan memaksimalkan implementasi program ini karena adanya beberapa hambatan yang ditemukan ketika berjalannya program penataan guru ini.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu pelaksanaan penelitian. Penelitian juga menggunakan teknik *purposive sampling* dimana informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu.

Arah Masa Depan. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian dan masih banyaknya kekurangan, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi penataan dan pemerataan ASN guru SMP di Kabupaten Pematang Jaya untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pematang Jaya beserta jajarannya, Kepala Sekolah beserta para guru dan staff yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). Dasar-Dasar Kejikan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, B. (2017). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Depdiknas, P. B. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga). Jakarta: Balai Pustaka.
- Kristianto, V. (2018). Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI). Yogyakarta: CV.Budi Utama.
- Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurdin, I. (2018). Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Simangunsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- (2019). Statistika Untuk 2 Penelitian. Bandung: CV.Alfabeta.